

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH
DI SURAKARTA
(Studi Empiris di Surakarta Tahun Anggaran 2006-2007)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :
INTAN PUSPITA
B 200 050 104

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Karena pembangunan di daerah menjadi salah satu indikator/penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 yang diperbaharui dengan UU No 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, sebagai revisi dari UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Menurut UU No 32 tahun 2004 yang diperbaharui dengan UU No 12 tahun 2008 bahwa pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan, maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Selain itu, juga dikeluarkan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sebagai revisi dari UU No 25 tahun 1999 dari UU tersebut diharapkan lebih mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dengan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi ini dititik beratkan pada daerah Kabupaten atau Kota karena daerah Kabupaten atau Kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Kedudukan faktor dalam penyelenggaraan suatu pemerintah sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri. Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri didalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proposal yang lebih kecil dan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara kesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan. Peningkatan cakupan Pendapatan Asli Daerah dapat pula dilakukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi daerah.

Daerah yang kaya sumber daya, mengalami masalah bagaimana menggunakan pendapatan yang melimpah, sedangkan daerah yang miskin disamping kesulitan dalam mengalokasikan sumber pendapatan yang terbatas juga dihadapkan pada bagaimana memperbesar sumber-sumber

yang akan dialokasikan dan darimana sumber-sumber tersebut akan diperoleh.

Di lain pihak, pelaksanaan otonomi daerah pada hakeketnya diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan (*service delivery*) pemerintah daerah (*local government*) kepada masyarakat (*social community*) agar lebih efisien dan responsif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing-masing daerah. Cara yang ditempuh yaitu dengan meningkatkan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri, tetapi masih dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, kewenangan pemerintah pusat menjadi semakin berkurang dan akan lebih berperan sebagai fasilitator sekaligus evaluator kepada seluruh pemerintah daerah (baik propinsi, kabupaten, dan kota) atas pelaksanaan otonomi daerah yang sudah dan sedang berjalan.

Untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah, maka perlu diadakan suatu analisis terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam era otonomi daerah. Alat analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis otonomi fiskal daerah atau otonomi desentralisasi fiskal. Otonomi desentralisasi fikal (*local fiscal autonomy*) adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu aspek penting dalam otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis mengambil judul : “Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau Aspek Keuangan (Studi Empiris Pada Wilayah Surakarta)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana menganalisis kinerja keuangan Kota Surakarta yang diukur dengan derajat otonomi fiskal pemerintah daerah Kota Surakarta pada aspek derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, dan upaya fiskal atau posisi fiskal tahun anggaran 2006 sampai dengan 2007 ?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Kota Surakarta yang diukur dengan derajat otonomi fiskal pemerintah daerah Kota Surakarta pada aspek derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, dan upaya fiskal atau posisi fiskal tahun anggaran 2006 sampai dengan 2007

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi instansi pemerintah daerah tingkat Kota Surakarta dapat dijadikan alternatif masukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerahnya melalui akuntabilitas kinerja pemerintah.
2. Bagi semua elemen masyarakat yang ingin mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta, dapat berperan aktif dengan ikut serta mengawasi kinerja pemerintah daerah sebagai perwujudan otonomi daerah yang demokratis
3. Bagi penulis untuk mengembangkan wawasan, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintah sesuai dengan teori yang telah didapatkan dibangku kuliah.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat dibagi menjadi 5 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah penulisan, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang otonomi daerah, tinjauan tentang kemandirian daerah, desentralisasi fiskal daerah,

keuangan daerah, kinerja keuangan daerah dengan tolak ukurnya serta tinjauan penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai alat-alat analisis untuk mengukur kinerja pemerintah daerah.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang keadaan umum daerah di Surakarta, dan membahas analisis data yang dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan analisis data dan saran yang diberikan kepada pemerintah daerah Surakarta dan keterbatasan penelitian